

PELUANG EKONOMI ISLAM DI ERA POST-KAPITALISME

Muhamad Mustaqim

ABSTRAK

Krisis ekonomi yang melanda negara-negara Uni Eropa akhir-akhir ini menjadi sebuah indikator bahwa sistem ekonomi kapitalistik mempunyai titik kelemahan yang signifikan. Meskipun sistem kapitalisme selalu melakukan penyesuaian dan perubahan, namun secara umum kapitalisme yang saat ini dianut oleh banyak Negara ini juga mempunyai anomali, yang siap mengantarkan Negara penganutnya menuju krisis. Dan nyatanya, krisis ekonomi ini bukan hanya terjadi di Eropa, Amerika Serikat sebagai Negara kiblat kapitalisme, pada tahun 2008 pernah mengalami hal yang sama. Bahkan sampai saat ini, perekonomian Amerika pasca krisis belum bisa bangkit dan pulih secara sempurna.

Pada sisi yang lain, ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di Indonesia, keberadaan sistem ekonomi syariah sedang mengalami pertumbuhan yang tajam, seperti jamur di musim penghujan. Maraknya lembaga perekonomian dan keuangan yang bercorak islam (syariah) menjadi satu indikator akan kebangkitan ekonomi islam. Seperti menjadi trend, keberadaan lembaga keuangan syariah ini, mulai Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sampai koperasi keuangan syariah hampir tersebar di berbagai penjuru daerah. Bahkan beberapa bank dan lembaga keuangan konvensional melakukan diversifikasi produk dalam bentuk syariah.

Di sinilah kiranya peluang ekonomi Islam sebagai sebuah alternative terhadap anomali-anomali yang terjadi pada sistem kapitalisme. Ekonomi Islam secara umum dapat dipahami sebagai upaya merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya yang seirama dengan maqashid (tujuan-tujuan syariah), tanpa mengekang kebebasan individu dan hak sosial. Jika pemahaman ini disepakati, maka ekonomi Islam akan mampu menjadi sebuah sistem ekonomi yang bertujuan menciptakan kesejahteraan, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai suci ilahiyah. Karakteristik islam yang membatasi penumpukan kekayaan secara mutlak, serta meniscayakan distribusi ekonomi secara proporsional, dengan dilandasi pada semangat mengabdikan (ibadah) maka akan semakin mendekatkan pada terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial.

Pada segi praktis, ekonomi Islam akan mampu menjawab berbagai persoalan-persoalan yang selama ini tidak mampu dijawab oleh sistem ekonomi kapitalistik, seperti persoalan pemerataan, kegiatan ekonomi yang fair, nilai religius dalam ekonomi

dan keadilan sosial. Sistem ekonomi Islam bersumbu pada prinsip-prinsip Qur'ani, seperti amanah, kepemilikan terbatas, kerjasama dalam kebaikan, tanggung jawab sosial, distribusi ekonomi dan keadilan akan mampu mengantarkan kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Dan secara pragmatis, ini merupakan peluang bagi ummat Islam untuk mampu mengembangkan kegiatan ekonomi di satu sisi, dan mengembangkan ilmu ekonomi Islam di sisi lain. Karena bagaimanapun ekonomi islam masih memerlukan banyak penyesuaian dan modifikasi sistem untuk mampu beradaptasi dengan kenyataan dunia pasca kapitalisme.

Kata kunci: kapitalisme, ekonomi Islam dan post-kapitalisme

A. Pendahuluan

Saat ini, dunia sedang berada pada sebuah babak dalam formasi sosial dunia. Babak tersebut adalah sebuah era di mana pasar menjadi sentral penentu nasib manusia. Negara yang selama ini diyakini sebagai institusi di mana manusia mampu berdaulat dan melindungi anggotanya, dibuat tidak berdaya dan diam seribu bahasa. Era ini sering disebut dengan era globalisasi, di mana batas Negara-Bangsa digeser sehingga menjadi sebuah desa besar (*the large village*), tanpa ada sekat yang membatasi.

Adalah Francis Fukuyama, seorang sejarawan dan futurolog Jepang yang meramalkan bahwa pasca perang dingin antara Blok Barat yang dikomandoi Amerika Serikat dan Blok Timur yang dinahkodai Uni Soviet, kapitalisme-liberal terbukti mampu mengalahkan sosialisme komunis. Dengan demikian, akan terjadi apa yang disebut sebagai *the end of ideology*, berakhirnya sebuah ideology dunia. Dan kapitalisme liberal adalah ideology terakhir yang menjadi pemenang atas ideologi-ideologi dunia yang lain.⁶¹² Bagi Fukuyama, kapitalisme adalah sebuah ideologi pemenang yang tanpa ada tanding. Sehingga, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris era 70-an, "*There Is No Alternative*", tidak ada alternatif lain selain pilihan tunggal kapitalisme.

Lain halnya dengan Samuel Huntington, yang menganggap akan ada babak baru dalam pertentangan ideology (baca: peradaban). Dalam bukunya *The Clash of Civilization*, Huntington meramalkan bahwa berakhirnya perang dingin, akan ada peradaban-peradaban besar dunia yang saling berhadap-hadapan. Huntington mentesakan ada 7 peradaban dunia yang akan bersaing dalam membangun kekuasaan, yaitu barat WSAP, Congfucian, Jepang, Islam, Hindu, Slavia-Ortodoks dan Amerika Latin. Di antara tujuh peradaban besar dunia tersebut, dua peradaban besar akan saling

⁶¹² Francis Fukuyama, Samuel P. Huntington, *The Future of World Order* (Yogyakarta: Ircisod, 2005), 31.

berbenturan, yakni barat dan Islam.⁶¹³ Di sini, Islam dianggap sebagai peradaban yang akan bergesekan dengan Barat. Jika hal ini dihubungkan dengan tesis Fukuyama, maka Barat-kapitalisme yang telah memenangkan perang dingin, akan berhadapan dengan Islam yang saat ini sedang di abad kebangkitan. Pertarungan Barat-Islam boleh jadi telah kita jumpai dalam dua dasawarsa terakhir ini. Isu terorisme yang kemudian dilabelkan pada Islam oleh Barat, ditambah dengan konflik Barat dengan Negara-negara islam di Timur Tengah setidaknya menjadi penanda ketegangan ini.

Namun dalam bidang ekonomi, dominasi dan kemenangan kapitalisme tampaknya memasuki masa-masa suram. Beberapa krisis yang akhir-akhir ini melanda Negara-negara di Amerika dan Eropa, yang nota bene merupakan Negara penyangga kapitalisme menjadi bukti tetapi ideologi ekonomi kapitalis tidak sekuat yang diyakini selama ini. Krisis ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 2008 lalu misalnya, betapa Amerika Serikat “menghianati” apa yang menjadi doktrin utama kapitalisme, menyingkirkan peran Negara. Dalam kasus krisis Amerika Serikat tersebut, Amerika justru mengeluarkan kebijakan yang kontradiksi dengan teori dasar kapitalisme, yakni dengan adanya campur tangan Negara dalam penyelesaian krisis. Padahal intervensi Negara dalam ekonomi merupakan hal yang paling “haram” dalam teori kapitalisme klasik maupun neo-kapitalisme.

Dan yang paling akhir adalah krisis yang terjadi di Uni Eropa. Persekutuan Negara-negara Eropa yang tergabung dalam Uni-Eropa ini pada awalnya dipercayai sebagai kekuatan ekonomi dunia yang paling kokoh. Bahkan mata uang Uero yang menjadi mata uang bersama Uni-eropa pernah menguat dan bersaing ketat dengan Dollar Amerika. Namun awal 2010 kemarin menjadi awal petaka bagi ekonomi eropa. Krisis Yunani, yang diikuti oleh Negara-negara eropa lainnya terutama Irlandia dan Portugal menjadi awal the great depression bagi kapitalisme Eropa, meskipun memang tak seheboh depresi besar tahun 1930-an. Dalam kasus Yunani misalnya, utang Negara lebih besar dari GDP (*Gross Domestic Product*) serta terjadi defisit Negara, yakni pengeluaran Negara lebih besar daripada pendapatan Negara.

Ada beberapa analisis tentang penyebab krisis Yunani ini. Dan salah satu yang paling dominan adalah faktor sumber daya manusia pelaku ekonomi. Konon dalam menghadapi krisis, pemerintah menyewa bank investasi untuk mengatur transaksi yang dapat menyembunyikan angka sesungguhnya dari jumlah utang pemerintah. Pemerintah Yunani juga diketahui telah mengutak atik data-data statistik ekonomi makro, sehingga kondisi perekonomian mereka tampak normal dan stabil. Namun pada akhirnya, kecurangan tidak dapat ditutupi. Salah satu penyebab utama dari defisit tersebut adalah banyaknya kasus penggelapan pajak, yang diperkirakan telah merugikan negara hingga US\$ 20 milyar per tahun.⁶¹⁴ Ini berarti bahwa sistem kapitalisme tidak mampu

⁶¹³ *Ibid.*, 9

⁶¹⁴ *Harian Republika*, 22 Juni 2012.

membendung moralitas para pelakunya. Kemegahan teori kapitalisme harus runtuh oleh para pemain ekonomi “jahat”, yang tidak memiliki nilai moral dan tanggung jawab yang tinggi.

Berangkat dari sini, maka ekonomi Islam tampaknya mempunyai peluang besar dalam rangka menggeser ekonomi status quo kapitalisme. Perkembangan ekonomi syariah yang saat ini bisa dikatakan melaju pesat, menjadi kekuatan “tandingan” bagi keberadaan kapitalisme yang sudah memasuki masa kemunduran. Tanpa bermaksud mengamini Huntington, islam merupakan peradaban besar yang mempunyai visi untuk menciptakan kesejahteraan dan perdamaian dunia. Dan di era post-kapitalisme inilah, ekonomi islam mencapai titik relevansinya sebagai kekuatan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai noral dan peradaban Islam.

B. Sejarah Kapitalisme

Globalisasi, pada dasarnya adalah proses sejarah dominasi dan eksploitasi manusia atas manusia yang lain.⁶¹⁵ Dan dalam sejarah manusia, proses dominasi ini telah ada lebih dari lima ratus tahun yang lalu. Dalam hal ini, proses tersebut dapat dibagi menjadi tiga tahap. *Tahap pertama* adalah periode kolonialisme. Tahap ini didasari oleh keterbatasan bahan baku industri di negeri sendiri, sehingga mengharuskan ekspansi ke negara lain. Inilah babak pertama penjajahan manusia secara fisik. Dan proses ini telah berlangsung selama berabad-abad. Betapa masih ingat dalam benak kita bahwa negara kita pernah terjajah lebih dari tiga setengah abad. Sebuah kurun waktu yang sangat lama, sebanding dengan 6 turunan manusia. Periode ini berakhir pasca perang dunia II, di tandai dengan banyaknya revolusi negara-negara jajahan menuju kemerdekaan.

Tahap kedua adalah neo kolonialisme, atau developmentalisme. Berakhirnya Seteru perang dunia II, menandakan era baru formasi dunia. Tetapi itu bukan berarti era penjajahan telah selesai, melainkan penjajahan akan tetap ada, dengan menampilkan wajah manis dan berseri. Lepas dari mulut harimau, masuk mulut buaya, pepatah itu yang barangkali tepat untuk menggambarkan keadaan negara-negara yang baru merdeka. Karena pada fase ini, penjajahan secara fisik dan langsung memang sudah tidak ada - sebagaimana di tuangkan dalam declaration of human right, yang merupakan buatan negara-negara kolonial. Tetapi penjajahan kali ini lebih kepada penjajahan non fisik, khususnya penjajahan teori dan ideologi.

Tahun 1944 dilaksanakan pertemuan di *Bretton Woods*, Amerika Serikat antara negara-negara Eropa dan Amerika. Hasil kesepakatan ini – yang dikenal dengan kesepakatan Bretton woods – secara umum menghasilkan tiga organisasi internasional

⁶¹⁵ Mansour Fakh, *Bebas dari Neoliberalisme* (Yogyakarta: Insist, 2003), 45

baru. Untuk mengatur sistem moneter internasional, di bentuklah IMF (*International Monetary Fund*). Untuk mendanai proyek-proyek pembangunan negara dunia ketiga di bentuklah WB (*World Bank*), dengan hidden agenda, menciptakan ketergantungan negara bekas jajahan. Sedangkan untuk mengatur lalu lintas perdagangan multilateral, dicanangkan GATT (*General Agreement on Tarrif and Trade*). Semuanya bertujuan untuk mengendalikan arus ekonomui dunia untuk melakukan hegemoni terhadap dunia ketiga, dengan slogan Pembangunan.

Doktrin Pembangunanisme pada era ini boleh jadi merupakan trend dunia yang tak terbantahkan. Di saat negara- negara yang baru merdeka memerlukan pembangunan yang intens, organisasi dunia ini datang dengan menawarkan bantuan yang menggiurkan, meskipun sebenarnya sangat mematikan.

Di Indonesia sendiri, Pembangunan menjadi sebuah ideologi bangsa yang menghujam kuat di jiwa para birokrat, khususnya masa orde baru. Dengan dalih *trickle down effec*, efek menentes ke bawah, pembangunan seakan-akan satu-satunya jalan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari hegemoni teori barat yang di tancapkan ke negara dunia ketiga. Sebagai contoh, Rostow dengan teori pembangunannya yang terkenal dengan *the five-stage scheme*. Menurutny semua masyarakat pada dasarnya merupakan masyarakat “tradisional”. Tradional dalam hal ini dianggapnya sebagai suatu masalah. Untuk itu, tradisional harus di rubah menuju modern. Untuk menuju ke masyarakat modern, developmen mutlak di perlukan. Sehingga, pembangunan merupakan prasyarat menuju masyarakat modern.

Periode ketiga, era globalisasi yang terjadi menjelang abad kedua puluh satu. Era ini ditandai dengan proses liberalisasi di segala bidang. Liberalisasi ini sesungguhnya dipaksakan melalui *Structural Adjusment Program* (SAP), yakni persetujuan perdagangan yang di sepakati melalui lembaga dunia WTO (*World Trade Organization*). Melalui WTO ini, arus perdagangan dunia dikendalikan oleh negara-negara kaya yang menanamkan modalnya di WTO. Dan ironisnya, mekanisme pengambilan keputusan WTO dilakukan melalui pengambilan suara anggota, yang didasarkan pada besarnya modal yang di tanamkan.

C. Hegemoni Kapitalisme

Jika kita disuruh memilih, antara hidup kaya atau miskin, sepertinya setiap orang aakn memilih untuk hidup kaya, mewah dan harta yang berlimpah. Pun demikian juga, kebanyakan orang akan memilih adanya kebebasan individu yang tak terbatas oleh aturan aturan yang menjerat. Kecenderungan inilah yang oleh Antonio gramsci disebut sebagai Hegemoni. Hegemoni merupakan upaya pemaksaan (*coercion*) suatu kelompok atas kelompok yang lain, dengan cara persetujuan kelompok tertindas melalui system yang ada. Dengan kata lain, hegemoni merupakan sebuah upaya penguasa global untuk

membentuk pikiran, pandangan paradigma dan perilaku masyarakat – dan Negara – yang dikuasai agar sesuai dengan yang dikehendakinya, demi kelangsungan kekuasaan. Di sini, kelompok dunia pertama, dengan paradigma kapitalismenya mencoba menancapkan hegemoninya kepada Negara-negara dunia ketiga, yang merupakan Negara berkembang.

Hegemoni dibentuk melalui pranata masyarakat dalam menciptakan persepsi tentang realitas sosial. Disini, hegemoni merupakan bentuk control dan kekuasaan yang sangat penting dan efektif. Sehingga kekuasaan hegemonik merupakan kekuasaan melalui persetujuan, yang mencakup jenis penerimaan intelektual dan emosional atas tatanan sosioal-politik yang ada. Persetujuan untuk menerima “paksaan” secara halus ini menunjukkan ungkapan intelektual dan moral massa untuk terikat pada ideology dan kepemimpinan politik, sebagai ungkapan keyakinan dan aspirasinya.

Konsep pembangunan adalah bentuk riil dari upaya hegemoni dunia ketiga oleh kekuatan kapitalisme. Hampir setiap Negara dunia ketika percaya dan yakin bahwa dengan pembangunan, kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Melalui doktrin modernisasi, pembangunan seakan –akan alternatif tunggal dalam proses perkembangan sebuah Negara.

Doktrin pertumbuhan Rostow adalah bagian dari intelektual hegemoni ideologi developmentalisme. Dengan teori pertumbuhannya, pembangunan adalah prasyarat mutlak untuk merubah Negara yang tradisional menuju Negara modern dengan orientasi industrialisasi. *Teori five-stage scheme* (skema lima tahap) oleh WW Rostow disebar luaskan hampir ke seluruh negara dunia ketiga dan terbukti, semua Negara tersebut mengikuti – dan menikmati – upaya hegemoni tersebut. Dan Indonesia adalah salah satu Negara yang sangat enjoy dan bangga – dan berhasil – dalam konteks pembangunanisme. Era Orde baru menjadi saksi betapa pembangunan ekonomi, dengan logika *tickle down effect* (dampak menetes ke bawah) menjadi persepsi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun menjanjikan banyak kemanfaatan, namun ternyata pembangunanisme terbukti paradok dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, bentuk hegemoni kuasa kapitalis mencapai relevansainya. Kemajuan sistem komunikasi dan informasi adalah senjata ampuh yang di jadikan gerbong upaya hegemoni tersebut. Dengan mengkampanyekan sarana komunikasi yang canggih, negara berkembang dipaksa untuk melakukan ketergantungan kepada Negara-negara produksi. Emanuel Wellerstain dan teman-temannya di *Fernan Broudeh Center Binghamton University* memperkenalkan sistem dunia persepektif wilayah kerja (*international division of labour*).

Dalam hal ini, dunia dibagi menjadi tiga wilayah kerja, yaitu: pertama, negara inti (*core*), terdiri dari negara yang memiliki proses-proses produksi yang canggih, di daerah ini borjuis indigenous memiliki industri otonom yang memproduksi komoditas

manufaktur untuk pasar dunia. Negara *core* pada umumnya adalah *Northwest* Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Australia. Kedua negara pinggiran (*periferi*), terdiri dari negara-negara yang memiliki proses produksi yang sederhana. Biasanya produk-produk negara periferi ikut menyumbang proses akumulasi kapital di negara-negara *core* karena dagang memerlukan pertukaran-pertukaran yang tidak seimbang. Kontrol buruh juga dijalankan dengan kekerasan, dengan struktur negara yang lemah.

Ketiga, Semi Periferi, mempunyai kompleksitas kegiatan ekonomi, modus kontrol buruh, mesin negara yang kuat dan sebagainya. Fungsi politik periferi adalah sebagai *buffer zone* antara dua kekuatan yang saling berlawanan. Secara historis, semi periferi terdiri dari negara-negara yang sedang naik atau turun dalam system dunia.

Hegemoni alat-alat produksi dalam hal ini dilakukan oleh negara *core* kepada negara-negara semi-periferi maupun periferi. Ketergantungan terhadap alat komunikasi dan informasi yang perkembangannya dalam hitungan detik ini menjadikan negara periferi maupun semi periferi, mau tidak mau berusaha mengikuti perkembangan pasar, dengan melakukan ikatan kerja dengan negara inti. Kalau sudah seperti ini, tak pelak terjadi sebuah ketergantungan, yang pada akhirnya mampu mempengaruhi kegiatan politik, ekonomi maupun budaya di negara baik periferi maupun semi periferi. Pasar bebas dalam hal ini menjadi pupuk subur proses hegemoni.

Dengan doktrin persaingan sehat dan efisiensi, negara-negara miskin dan berkembang mencoba dihegemoni dengan berbagai barang yang murah dan berkualitas. Inilah peluang bagi Perusahaan global untuk menancapkan kuku hegemoninya dalam membentuk budaya dan pola hidup masyarakat. Dengan barang yang di ciptakan, pola hidup masyarakat di bangun dengan perlahan. Pola konsumneris adalah bagian dari target proses hegemoni. Jika masyarakat sudah mempunyai pola konsumerisme, maka pengendalian melalui barang-barang kebutuhan atas kesadaran dan pola hidup menjadi efektif.

Sampai sini peran negara kemudian turun pada derajat yang sangat rendah. Negara dibuat diam seribu bahasa atas pola liberalisasi pasar. Kuasa negara yang sebenarnya mempunyai kekuatan memaksa mencoba digeser dengan dalih-dalih demokrasi, liberalisasi dan modernisasi. Hegemoni pasar atas negara dan masyarakat adalah bentruk kekuasaan negara atau kelompok dominan untuk membentuk kesadaran kelompok subordinat.

Sebuah fakta menarik, sebagaimana yang pernah diungkap oleh Norena Herzt bahwa televisi merupakan wahana yang ampuh untuk melakukan proses hegemoni. Lebih tegas Herzt mengatakan bahwa revolusi tidak akan disiarkan melalui televisi. Karena Televisi hanya akan melayani kekuatan-kekuatan pemodal. Sedangkan segala aktifitas atau apapun yang kontra produktif dengan kepentingan kapitalis, sudah barang tentu tidak menjadi mitra kerjanya. Dalam hal ini, Herzt mencontohkan bahwa bagaimana

stasion televisi Amerika Serikat seperti NBC, ABC dan CBS secara tegas menolak untuk menayangkan iklan *Buy Nothing Day* (Hari Tanpa Membeli), meskipun ada bayaran untuk iklan tersebut. Para pemilik stasion secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak akan menayangkan iklan yang bertentangan dengan bisnis sah mereka. Bahkan dengan tegas pula mereka menyatakan bahwa *Buy Nothing Day* adalah berentangan dengan kebijakan ekonomi Amerika.⁶¹⁶

Disamping itu, hegemoni juga menggunakan pendidikan sebagai piranti penyokongnya. Jika Pendidikan diyakini sebagai upaya sadar membangun manusia yang dewasa dan sempurna, maka dengan pendidikanlah tipologi manusia konsumeris dibentuk. Di sini pendidikan sengaja *diset up* dengan konsep yang berorientasi pembangunan orientasi pasar. Sehingga mentalitas *matrealistik* dan hedonis mejadi pintu masuk untuk melanggengkan doninasi kuasanya. Satu contoh yang relevan adalah wacana pemikir barat yang pro-kapitalis menempati porsi yang besar dalam kurikulum pendidikan. Ini adalah bagian dari upaya hegemoni wacana kepada masyarakat, sehingga kesadaran intelektualnya akan senantia matching dengan kekuatan kapitalis.

Jika sekolah yang merupakan institusi sakral mampu dijamah oleh pasar, maka sudah barang pasti output dari sekolah akan selalu berorientasi pada pasar. Di sinilah kehebatan hegemoni pasar menempati titik relevansi yang nyata. Sehingga masyarakat kita yang sudah berabad-abad dikuasai oleh kekuatan asing yang cenderung kapitalis mempunyai kesadaran dan intelektual yang sudah *mind set*.

D. Anomali Kapitalisme

Hari ini sistem sosial dunia sedang dibentuk dengan sebuah system global yang mampu merasuk ke ranah terkecil dalam masyarakat. Globalisasi, menawarkan berbagai macam kemudahan bagi masyarakat di belahan dunia manapun, sehingga setiap orang dalam arus bawah sadar akan mengikuti buaian globalisasi tersebut. System informasi dan komunikasi adalah lokomotif yang menarik “gerbong” kebutuhan masyarakat.

Antony Gidden, pernah mengatakan bahwa globalisasi bukanlah apa yang ada dan terlihat di luar sana. Tapi globalisasi adalah apa yang mempengaruhi aspek kehidupan kita yang sangat intim dan pribadi sekalipun.⁶¹⁷ Nah inilah masa yang tak tertawar lagi, sehingga memaksa semua orang - termasuk Negara- untuk mengikutinya.

Trend Globalisasi di tandai dengan tergesernya peran Negara yang selama ini berfungsi melindungi warganya. Adalah sebuah permakluman, jika Negara merupakan sebuah entitas, dimana orang-per-orang berafiliasi di dalamnya untuk sebuah tujuan. Bahkan untuk tujuan bersama tersebut, Negara mempunyai kemampuan memaksa,

⁶¹⁶ Noorena Hertz, *Perampok Negara* (terj) (Yogyakarta: Alenia, 2005), 53.

⁶¹⁷ Antonio Giddens, *Jalan Ketiga* (terj), (Jakarta: Gramedia, 1999), 24.

anggotanya untuk mentaati apa yang menjadi konsensus bersama. dalam hal ini, Indonesia, sebuah Negara bangsa yang sudah memproklamirkan kemerdekaannya, mempunyai tekad bersama untuk mampu mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyatnya. Namun “keperkasaan” Negara sebagaimana yang selama ini ada, saat ini akan mengalami pergeseran yang cukup krusial. Oleh globalisasi, Negara mencoba dikebiri oleh sebuah pisau yang bernama pasar.

Saat semua asset Negara diambil alih oleh pihak swasta inilah kredibilitas Negara dipertanyakan. Sayangnya, pihak swasta dalam hal ini bukanlah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh warga negaranya. Namun dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan raksasa global, yang beroperasi di hampir seluruh penjuru dunia. Perusahaan tersebut adalah TNC (*Trans National Corporation*) atau MNC (*Multi National Corporation*). Perusahaan inilah yang mengambil alih secara diam-diam (*silent take over*) semua milik Negara. Inilah dunia baru yang segera – dan bahkan sudah – dimulai. Inilah dunia dimana kekayaan perusahaan menyerap habis kekayaan Negara.⁶¹⁸

E. Depresi ekonomi dan Post-Kapitalisme

Kritik terhadap kapitalisme sejak awal sudah diungkapkan oleh tokoh sosialisme, Karl Marx. Marx meramalkan bahwa kapitalisme pada saatnya nanti akan mengalami keruntuhan secara alamiah. Indikasinya adalah karena akumulasi modal yang tanpa batas akan melahirkan kelas sosial yang saling bertentangan. Konflik antar kelas bojuis dan kelas proletar inilah yang oleh Marx diprediksi akan melahirkan sebuah revolusi sosial.⁶¹⁹ Revolusi ini yang menjadi tanda keruntuhan kapitalisme, di mana kelas sosial musnah.

Meskipun ramalan marx ini tidak terbukti benar seratus persen, namun perjuangan kelas buruh telah member ambal bagi revolusi bolsevik di Rusia. Perjuangan kaum proletar dalam menghilangkan kelas sosial menjadi tonggak kejayaan ideologi sosialisme-komunisme di Rusia.

Selanjutnya, sejarah juga mencatat bahwa kapitalisme juga pernah mengalami masa keterpurukan yang sangat dasyat. *Great depression* (depresi besar) ekonomi pernah melanda Amerika, yang juga berdampak bagi ekonomi dunia secara umum. Peristiwa kehancuran bursa tersebut juga dikenal dalam beberapa tahapan yang dikenal dengan julukan Black Thursday (Kamis Hitam) yang merupakan awal terjadinya keruntuhan pada bursa. Walaupun para ahli ekonomi dan para ahli sejarah tidak sependapat atas peran kehancuran bursa ini terhadap kejatuhan ekonomi yang terjadi

⁶¹⁸ Norena Herzt, *op.cit*, 34.

⁶¹⁹ Frans Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), 113.

sesudahnya, beberapa menganggap kehancuran ini sebagai awal dari terjadinya depresi besar ini. Akan tetapi kebanyakan ahli sejarah menyetujui pendapat bahwa kehancuran bursa tersebut adalah hanya merupakan "gejala" daripada merupakan "penyebab" *great depression*. Kehancuran bursa saat itu juga merupakan titik awal dari reformasi penting dari peraturan-peraturan hukum di bidang finansial dan perdagangan. Depresi yang terjadi pada tahun 1929 tersebut berimbas pada melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia. Bahkan dampak dari depresi ini kemudian merambat ke Negara-negara di dunia, seperti Turki, Amerika Latin, Australi, India, juga Indonesia.⁶²⁰

Berikutnya depresi juga terjadi beberapa kali pada Negara-negara yang mengikuti paham ekonomi kapitalis, meskipun tidak sebesar dan sedasyat pada tahun 1930-an tersebut. Tahun 1997 adalah krisis ekonomi yang cukup besar bagi Negara-negara di Asia. Indonesia misalnya, mengalami krisis yang luar biasa dasyat, di mana nilai rupiah pada saat ini anjlok sampai pada 500%. Inflasi yang tak tertahan inipun memaksa Indonesia untuk berhutang pada lembaga keuangan dunia, semisal IMF. Bahkan dampak krisis 1997 masih terasa sampai sekarang, nilai tukar rupiah tetap saja masih sangat rendah.

Amerika juga pernah mengalami hal yang sama. Depresi Amerika dimulai dari bangkrutnya bisnis property yang memicu krisis ekonomi pada level nasional. Hingga akhirnya, Pemerintah amerika mengeluarkan kebijakan bailout untuk meredam dampak krisis tersebut. Padahal, ekonomi kapitalisme sangat anti terhadap intervensi Negara.

Dan yang akhir-akhir ini masih aktual adalah krisis yang terjadi di Eropa. Di mulai dari Yunani, Irlandia dan Portugal, krisis ini merambat ke hampir semua Negara-negara Eropa. Perancis dan Italy misalnya, selama ini kedua Negara tersebut mempunyai rasio pertumbuhan ekonomi yang luar biasa bagus. Namun persekutuan mata uang euro telah meruntuhkan pertahanan ekonomi masing-masing Negara yang tergabung di dalamnya. Perlahan namun pasti, krisis ini akan menjadi bola salju yang makin-lama makin besar menyentuh ke Negara eropa lainnya, bahkan lintas benua.

Jika Amerika dan Eropa yang menjadi penopang ideologi kapitalis sudah mengalami masa-masa sulit, maka bisa diprediksi bahwa kapitalisme boleh jadi tidak mampu lagi bertahan. Anomali-anomali yang ada dalam sistem kapitalisme ibarat kanker yang semakin lama semakin membesar, mengancam eksistensi sistem cetusan Adam smith ini. Sehingga, bukan tidak mungkin kapitalisme akan mengalami keruntuhan. Era pasca krisis besar inilah yang kemudian penulis sebut dengan era post-kapitalisme. Post-kapitalisme mengisyaratkan adanya sistem ekonomi alternatif, yang mampu memberikan fondasi bagi sistem ekonomi. Dan ekonomi Islam dalam hal ini adalah salah satu alternatif terhadap dominasi ekonomi kapitalisme yang telah mapan.

⁶²⁰ Dietmar Rothmund, *Great Depression: Depresi Besar Ekonomi Amerika 1929-1930 dan Dampaknya Terhadap Kehancuran Ekonomi Dunia* (Jakarta: Imperium, 2010), 123.

F. Ekonomi Islam, Sebuah Alternatif Lain

Jika Margaret Thatcher pernah mengatakan” *There Is No Alternatif*” (TINA) maka kita pun sebenarnya bisa pula mengatakan “*There Is Many Alternatif*” (TIMA). Ekonomi Islam adalah salah satu alternatif atas ketimpangan sistem kapitalisme global. Dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang universal, maka ekonomi Islam akan mampu menjadikan wajah pasar yang ramah dan humanis. Secara etimologi, ekonomi Islam terdiri dari dua suku kata, yakni *ekonomi* dan *Islam*. Kata ekonomi dapat diartikan sebagai segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya; pengaturan rumah tangga. Sedangkan term Islam berarti: damai, tenteram; agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dengan kitab suci Al-Qur’an.⁶²¹

Secara mudah ekonomi Islam dapat diartikan sebagai segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya yang dilakukan dengan cara yang teratur, berdasarkan pandangan Islam. Ekonomi Islam dibangun di atas landasan yang kokoh yang merupakan warisan yang tak ternilai sebagai wasiat utama bagi umat Islam yang tidak mungkin manusia akan tersesat selamanya selama berpegang kepada dua wasiat itu yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.

Mengenai pemahaman tentang Ekonomi Islam, setidaknya ada tiga penafsiran tentang istilah Ekonomi Islam.⁶²² *Pertama*, yang dimaksud adalah “ilmu ekonomi” yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam. Kalau ini yang dimaksud, maka akan timbul kesan bahwa ajaran Islam itu mempunyai pengertian yang tersendiri mengenai apa itu ekonomi. Dalam hal ini, ada beberapa definisi mengenai ekonomi islam yang disampaikan oleh para pakar. Menurut Muhammad Abdul Mannan, Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut M.M. Metwally, Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti al Quran, Hadis, Ijma dan Qiyas.

Umar Chapra mendefinisikan Ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqashid (tujuan-tujuan syariah), tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidak seimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat.

Penafsiran *kedua*, ekonomi Islam dipandang sebagai “sistem ekonomi” (Islam). Sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu

⁶²¹ Pius Partanto dkk, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994)

⁶²² Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: LSAF, 1999), 4.

masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara metode tertentu. Misalnya, bank Islam dapat disebut sebagai unit (terbatas) dari beroperasinya suatu sistem ekonomi Islam, bisa dalam ruang lingkup makro atau mikro. Bank Islam disebut unit sistem ekonomi Islam, khususnya doktrin larangan riba.

Dan *ketiga*, ekonomi Islam itu berarti perekonomian umat Islam atau perekonomian di dunia Islam, maka kita akan mendapat sedikit penjelasan dan gambaran dalam sejarah umat umat Islam baik pada masa Nabi sampai sekarang. Hal ini bisa kita temukan, misalnya, bagaimana keadaan perekonomian umat Islam di Arab Saudi, Mesir, Irak, Iran, Indonesia, dan sebagainya, atau juga perekonomian umat Islam di negara non-Islam seperti Amerika, Cina, Perancis, dan sebagainya.

Kosa kata ekonomi merupakan kosa kata yang baru, dalam arti tidak dikenal pada masa awal Islam. Pada masa ini hanya mengenal istilah muamalah dalam arti luas, hubungan antar manusia secara umum: ekonomi, rumah tangga dan lain-lain. Istilah "*iqtishad*" (bahasa Arab) yang diartikan atau disepadankan dengan "ekonomi" merupakan kosa kata yang baru. Sehingga kita tidak menemukan pada literatur keislaman klasik. Istilah *iqtishad* muncul dari perkembangan pemikiran Muhammad Iqbal (1876-1938) salah seorang tokoh pembaruan Islam dari India. Pada tahun 1902 Iqbal menerbitkan buku yang berjudul "*Ilm al-Iqtishad*" (ilmu ekonomi). Pemikiran tentang ekonomi Islam sebagai kajian teoritis baru mulai ramai dibicarakan pada awal dasawarsa 1970-an, walaupun pembahasan yang bersifat fikih sudah tampak sebelumnya sebagai bagian dari pemikiran hukum Islam.

Kerangka teori sistem ekonomi Islam dibangun di atas landasan nilai-nilai dasar Ketuhanan (Tauhid) dimana internalisasi nilai-nilai Ketuhanan mampu memberikan dorongan yang kuat untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam tataran social kemanusiaan. Aspek-aspek kebutuhan dasar terhadap aktualisasi kemanusiaan dalam perfektif internasilasasi nilai tauhidi merupakan transformasi nilai yang dalam istilah, disebut obyektivikasi. Obyektifikasi merupakan penerjemahan nilai-nilai ke dalam kategori-kategori obyektif.⁶²³ Sehingga nilai dasar tauhid akan mendasari segala aktifitas dan prilaku ummat islam, termasuk dalam aspek ekonomi.

Ekonomi Islam mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan Islam, yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat, melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan tersebut dirumuskan dalam term *falah* (kemenangan). Dalam hal ini, *falah* di dunia mencakup 3 hal, yakni kelangsungan hidup, kebebasan keinginan serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan *falah* di akherat terdiri dari kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi dan pengetahuan abadi.⁶²⁴ Di sini,

⁶²³ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam : Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), 65.

⁶²⁴ Anita Rahmawati, *Ekonomi Makro Islam* (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 21.

tujuan jangka panjang (akherat) dan jangka pendek (dunia) menjadi orientasi yang selalu melekat pada kegiatan ekonomi.

G. Membangun Ekonomi Islam yang Humanis

Melihat dominasi kapitalis yang hari ini sangat kuat, maka ekonomi Islam diharapkan mampu menjadi konter terhadap hegemoni tersebut. Adalah Antonio Gramsci yang menawarkan sebuah konsep untuk melakukan konter terhadap hegemoni (*counter hegemony*). Bagi Gramsci, hegemoni harus dilawan dengan upaya penyadaran akan hegemoni kultural dan keterpesonaan terhadap hegemoni kapitalis. Konter hegemoni akan terwujud jika ada para intelektual yang mengakar pada basis masyarakat, yang telah terhegemoni.⁶²⁵ Dalam hal ini, ekonomi Islam merupakan perangkat intelektual yang didasarkan sebagai antitesis terhadap prinsip ekonomi kapitalis yang timpang.

Beberapa prinsip Ekonomi Islam, yang diharapkan sebagai *counter* hegemoni tersebut diantaranya adalah:

1. Prinsip amanah.

Islam menganggap berbagai jenis sumber daya yang ada merupakan pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kegiatan tersebut kelak akan dipertanggung-jawabkannya di akhirat.

Prinsip ini tidak diakui dalam system kapitalis. Tidak ada “Tuhan dan akherat” dalam urusan dunia. Mereka menganggap bahwa akherat itu tidak ada, dunia hanya akan berakhir ketika mereka mati. Sehingga kegiatan ekonomi bagi kapitalis tidak lain adalah pemenuhan kebutuhan dunia.

2. Prinsip kepemilikan terbatas.

Islam mengakui kepemilikan individu dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Kepemilikan individu dalam hal ini dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Selain itu, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.

Hal ini berbeda dengan prinsip kapitalis yang individualistik. Mereka menganggap bahwa apa yang dimiliki merupakan kepunyaan mutlak, yang didapatkannya dari hasil usaha. Sehingga, tidak ada tanggung jawab moral untuk

⁶²⁵ Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci* (terj) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 34.

mempertanggung jawabkannya. Kecenderungan ini mengarahkan manusia untuk menumpuk harta tanpa batas, tanpa memperhatikan orang lain.

3. Prinsip kerjasama dalam kebaikan.

Kekuatan penggerak utama Ekonomi Islam adalah kerjasama. Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT. Upaya pencapaian tujuan, harus selalu didasari dengan nilai-nilai Islam.

Sistem kapitalis menafikan prinsip ini. Meskipun mereka mengakui adanya prinsip kerjasama, namun kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama yang berbasis kepentingan. Dasar keuntungan menjadi sandaran dalam setiap kerjasama. Sehingga yang terjadi adalah *maciavellian*, lakukan apa saja, yang penting anda untung. Meskipun itu dilakukan dengan menginjak orang lain, menipu, menindas dan memaksa.

4. Prinsip tanggung jawab sosial.

Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Sistem Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja.

Konsep ini berlawanan dengan Sistem Ekonomi Kapitalis, dimana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum. Sehingga kepemilikan kekayaan hanya terfokus pada segelintir orang saja. Yang akan terjadi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.

5. Prinsip kepemilikan bersama.

Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Namun demikian, hal ini bukan berarti islam mendukung sosialis-komunis. Prinsip ini menekan Negara untuk pro-aktif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berbeda dengan kapitalisme yang menggeser peran Negara, namun ekonomi Islam memberikan kewenangan Negara (ulil amri) untuk menyeimbangkan sirkulasi kekayaan. Privatisasi yang liberal hanya akan melahirkan ketimpangan sosial yang jauh dari tujuan ajaran Islam.

6. Prinsip distribusi ekonomi.

Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya, yang ditujukan untuk orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

Lain halnya dengan kapitalisme yang menganjurkan kepemilikan individu semaksimal mungkin. Sebagaimana tesis penggagasnya, bahwa sistem ekonomi itu tidak perlu dibatasi, karena secara alamiah akan diseimbangkan oleh tangan-tangan gaib yang tak terlihat (*invisible hand*) yang bernama pasar.

7. Prinsip keadilan.

Islam melarang setiap pembayaran bunga atau riba atas berbagai bentuk pinjaman. Karena riba hanya akan menyakiti salah satu pihak, yang ini akan melahirkan ketidakadilan. Islam menganjurkan jual beli yang *fair*, dan melarang riba. Islam sangat mengutuk orang yang melakukan riba, karena riba hanya akan melahirkan ketidakadilan dalam ekonomi.⁶²⁶

Sistem kapitalis menjunjung tinggi bunga uang. Eksploitasi dalam hal ini menjadi sesuatu yang niscaya, yang termanifestasi dalam sebuah sistem.

Ketujuh prinsip tersebut setidaknya akan menjadi konter hegemoni terhadap dominasi kapitalisme global yang mapan. Meskipun itu tidak dapat terjadi secara instan, namun upaya pembumian prinsip ekonomi islam akan mampu membangun sistem yang lebih humanis.

Jika kapitalisme hari ini menjadi ideologi yang menang, itu karena didukung oleh paradigma normal yang hari ini berlaku. Sehingga, meminjam istilahnya Thomas Kuhn, jika paradigma ini sudah mengalami anomali, dan titik klimaksnya mengalami krisis, maka diperlukan sebuah paradigma baru untuk menggesernya. Pergeseran paradigma (*shifting paradigma*), akan membangun ilmu menjadi normal kembali.⁶²⁷ Paradigma baru itu boleh jadi adalah paradigma ekonomi islam. Mengingat paradigma normal “kapitalis” saat ini lambat tapi pasti telah mengalami banyak anomali. Sehingga melalui pembumian ekonomi islam yang massif dan komprehensif, akan terwujud sistem ekonomi ‘normal’ baru yang akan lebih humanis.

Melalui pendidikan, ekonomi islam sebagai paradigma baru akan terus diinternasionalisasi ke dalam diskursus dan wacana pendidikan. Jika hegemoni kapitalis selama ini dapat menancap tajam melalui pendidikan dan sistem informasi, maka dengan cara yang sama, ekonomi Islam akan mampu menjadi *counter* hegemoni melalui pendidikan dan informasi. Dan hal ini membutuhkan proses yang panjang dan substansial.

Perkembangan beberapa lembaga keuangan berbasis syariah yang meyebar di Indonesia akhir-akhir ini memberi sinyal akan kebangkitan ekonomi syariah. Hal ini harus didukung oleh sistem pendidikan ekonomi islam yang berbasis karakter. Karena,

⁶²⁶ Krishna Adityangga, *Membumikan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 31.

⁶²⁷ Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains* (terj.) (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 43.

sebagus apapun sistem, kalau tidak didukung oleh sumber daya manusia yang baik, maka sistem itu akan mudah untuk terjadi kecurangan. Ekonomi islam dalam hal ini tidak hanya mengahdirkan sistem ekonomi yang relevan dan humanis, namun juga mensyaratkan pelakunya – muslim beriman – untuk mampu membekali dirinya dengan nilai spiritualitas-prilaku yang islami. Hingga akhirnya, ekonomi islam ini benar-benar mampu menjadi alternative di era post-kapitalisme ini.

H. Simpulan

Dari paparan tulisan ini, ada beberapa kesimpulan yang menjadi titik simpul, yaitu:

- Krisis yang terjadi di Negara-negara Amerika dan Eropa adalah salah satu indikator akan anomaly dan kerancuan sistem kapitalisme. Inilah apa yang disebut dengan era post-kapitalisme, di mana kapitalisme akan mengalami titik lemah dan akhirnya hancur. Sistem ekonomi “tandingan” dalam hal ini diperlukan sebagai sistem ekonomi baru, pengganti sistem kapitalisme.
- Ekonomi islam merupakan upaya *counter* hegemoni terhadap dominasi kapitalis. Melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam, akan menjadi ‘paradigma baru’ yang akan mampu menggeser paradigm lama kapitalisme. Prinsip-prinsip tersebut adalah: prinsip amanah, kepemilikan individu yang terbatas, *taawwun ala al birr*, tanggung jawab sosial, kepemilikan bersama, distribusi ekonomi dan keadilan.
- Ekonomi Islam, tidak hanya memiliki sistem ekonomi yang kuat dan handal, namun juga didukung oleh karakter sumber daya manusia beriman yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip Islam.

Daftar Rujukan

- Abrahamsen, Rita. *Sudut Gelap Kemajuan* (terj). Yogyakarta: Lafal Pustaka, 2004.
- Adityangga, Krishna. *Membumikan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arif, Saiful. *Menolak Pembangunanisme*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Arif, Saiful. *Pemikiran-Pemikiran Revolusioner*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist, 2003.
- Fakih, Mansour. *Bebas dari Neoliberalisme*. Yogyakarta: Insist, 2003.

- Fukuyama, Francis. Huntington, Samuel P. *The Future of World Order*. Yogyakarta: Ircisod, 2005.
- Giddens, Antonio. *Jalan Ketiga* (terj). Jakarta: Gramedia, 1999.
- Hertz, Noorena. *Perampok Negara* (terj). Yogyakarta: Alenia, 2005.
- Khun, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolution: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam : Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1991
- Moehammad, Goenawan. *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Jogjakarta : UII-Press, 2000.
- Partanto, Pius. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Qardawi, Yusuf. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Akbar Media Sarana, 2001
- Rahardjo, Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: LSAF, 1999.
- Rahmawati, Anita. *Ekonomi Makro Islam*. Kudus: STAIN Kudus, 2009.
- Rothermund, Dietmar. *Great Depression: Depresi Besar Ekonomi Amerika 1929-1930 dan Dampaknya Terhadap Kehancuran Ekonomi Dunia*. Jakarta: Imperium, 2010.
- Simon, Roger. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci* (terj). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Suseno, Frans Magnis. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001.
- Tabb, William K. *Tabir Politik Globalisasi* (terj). Yogyakarta: Lafal Pustaka, 2006
- Wallerstein, Immanuel. *Lintas Batas Ilmu Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 1997.

Surat Kabar dan Internet

Harian Republika, 22 Juni 2012.

<http://hermanmoslem.blogspot.com/2009/11/prinsip-prinsip-ekonomi-islam.html/>, 10 Oktober 2012.

<http://tanbihun.com/kajian/analisis/prinsip-prinsip-ekonomi-islam/>, 10 Oktober 2012.